

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan kejuruan memiliki peran strategis dalam menyiapkan sumber daya manusia yang terampil dan siap kerja di era revolusi industri 4.0. Dalam upaya meningkatkan relevansi dan mutu pembelajaran di satuan pendidikan kejuruan, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) telah meluncurkan kebijakan Kurikulum Merdeka sebagai bentuk penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya. Kurikulum Merdeka bertujuan untuk memberikan keleluasaan bagi sekolah dan guru dalam mengembangkan pembelajaran yang lebih kontekstual, fleksibel, dan berpusat pada peserta didik (Kemendikbudristek, 2022).

Kurikulum Merdeka Belajar merupakan sebuah paradigma baru dalam dunia pendidikan di Indonesia. Kebijakan ini dirancang untuk memberikan keleluasaan bagi sekolah dan guru dalam mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi peserta didik. Dengan adanya Kurikulum Merdeka Belajar, diharapkan proses pembelajaran akan lebih berpusat pada siswa, lebih fleksibel, dan lebih inovatif. Kurikulum Merdeka menekankan pentingnya penguatan kompetensi esensial, diferensiasi pembelajaran, dan pengembangan Profil Pelajar Pancasila sebagai visi utama pendidikan nasional. Di lingkungan SMK, implementasi Kurikulum Merdeka harus diarahkan untuk meningkatkan keterampilan vokasional siswa, membentuk karakter unggul, dan menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan dunia kerja. Menurut Sudrajat (2023),

keberhasilan implementasi Kurikulum Merdeka di SMK sangat bergantung pada kapasitas manajerial kepala sekolah dan kesiapan guru dalam menerjemahkan kebijakan ke dalam praktik pembelajaran.

Manajemen implementasi kurikulum merupakan aspek krusial dalam memastikan bahwa proses transformasi kurikulum berjalan secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan. Robbins dan Coulter (2021) menyatakan bahwa manajemen dalam pendidikan mencakup proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan (POAC) terhadap seluruh komponen pendidikan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks Kurikulum Merdeka, kepala sekolah sebagai manajer pendidikan bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya, mengembangkan kompetensi guru, dan membangun ekosistem belajar yang adaptif terhadap perubahan. Menurut Charismiadi (2021) Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar membutuhkan persiapan yang matang, baik dari segi kebijakan, sumber daya manusia, maupun sumber daya lainnya. Oleh karena itu, diperlukan suatu rencana manajemen yang komprehensif agar proses implementasi dapat berjalan dengan lancar dan mencapai tujuan yang diharapkan.

Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar menjadi kebutuhan mendesak dalam upaya memperbaiki mutu pendidikan di Indonesia. Selama ini, sistem pendidikan cenderung kaku, terpusat, dan kurang responsif terhadap kebutuhan peserta didik yang beragam. Kurikulum yang berlaku seringkali lebih menekankan pada aspek hafalan dan kurang merangsang kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan inovatif pada siswa. Penelitian Widyastuti dan Santosa (2023) dalam *Jurnal Manajemen Pendidikan* menunjukkan bahwa salah satu kendala utama dalam

implementasi Kurikulum Merdeka adalah kurangnya pemahaman guru terhadap konsep dan struktur kurikulum, serta minimnya supervisi akademik yang membina. Hal ini diperkuat oleh studi dari Yuliana dan Saputra (2022) yang menemukan bahwa sekolah dengan manajemen implementasi kurikulum yang kuat cenderung memiliki mutu pembelajaran yang lebih baik, ditandai dengan peningkatan hasil belajar siswa dan partisipasi aktif guru dalam inovasi pembelajaran.

Berbagai permasalahan klasik dalam dunia pendidikan, seperti kesenjangan antara pembelajaran di kelas dengan kebutuhan dunia kerja, minimnya penguasaan keterampilan abad 21, serta rendahnya motivasi belajar siswa, menjadi faktor pendorong perlunya Kurikulum Merdeka Belajar dilaksanakan. Kebijakan ini diharapkan dapat mengubah paradigma pembelajaran menjadi lebih berpusat pada siswa, memberikan keleluasaan bagi sekolah dan guru dalam mengembangkan kurikulum, serta mendorong terciptanya inovasi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik.

Selain itu, implementasi Kurikulum Merdeka Belajar juga sejalan dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan daya saing bangsa di era globalisasi. Dengan memberikan kebebasan yang lebih luas kepada sekolah dan guru, diharapkan akan muncul berbagai inovasi yang dapat menghasilkan lulusan yang unggul, berdaya saing, serta mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Dimana kurikulum disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). Selain itu, perubahan kurikulum juga dilakukan untuk memperbaharui sistem pendidikan yang ada sebelumnya.

Kurikulum pada dasarnya harus dapat menjawab tantangan di masa depan

dalam hal penguasaan pengetahuan, sikap, dan keterampilan untuk dapat beradaptasi dengan lingkungan yang selalu berubah. Menurut Mulyasa (2019) Implementasi perubahan kebijakan pendidikan termasuk kurikulum, adalah suatu proses pembelajaran yang panjang. Pemerintah memberikan kesempatan kepada guru untuk mewujudkan cara pembelajaran yang mampu mawadahi kreativitas dan ide, yakni mengimplementasikan kurikulum merdeka.

Menurut Rosyada (2014) Kurikulum Merdeka dirancang sebagai bagian dari upaya Kemendikbudristek untuk mengatasi krisis belajar yang telah lama kita hadapi, dan menjadi semakin parah karena pandemi. Krisis ini ditandai oleh rendahnya hasil belajar peserta didik, bahkan dalam hal yang mendasar seperti literasi membaca. Kurikulum merdeka sesungguhnya baru diterapkan di beberapa sekolah di Indonesia, baik pada jenjang dasar ataupun menengah. Kurikulum merdeka sesuai dengan kesiapan masing-masing, dan berangsur-angsur semakin mahir dalam menggunakannya. Kurikulum merdeka merupakan kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam, dimana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Guru lebih fleksibel dalam memilih jenis perangkat ajar sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik. Dalam hal ini untuk menguatkan pencapaian profil pelajar Pancasila dikembangkan berdasarkan tema tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah.

Menurut Faiz & Kurniawaty (2020) Perubahan kurikulum terjadi secara sistematis sesuai dengan perkembangan zaman dan teknologi. Beberapa kebijakan seringkali diubah oleh pihak sekolah untuk menyesuaikan dengan peraturan terbaru

dari pemerintah dan kondisi di lingkungan sekolah. Perubahan dimulai dari kurikulum merdeka menjadi kurikulum darurat yang diimplementasikan sesuai dengan kondisi serta mengambil beberapa kompetensi yang dirasa dapat dicapai.

Menurut Suyanto (2017), pelaksanaan kurikulum merdeka sebenarnya belum direalisasikan secara maksimal. Tujuan dari kurikulum merdeka adalah untuk mengembangkan suatu proses pembelajaran yang produktif, kreatif, inovatif, dan efektif yang akan diintegrasikan oleh kemampuan kognitif, sikap, dan keterampilan. Selain itu, dimasa sekarang guru selalu dituntut untuk mampu beradaptasi dengan teknologi guna mendukung revolusi industri 4.0. Kemampuan ini juga harus dikuasai karena pembelajaran di masa sekarang tidak hanya dilakukan secara tatap muka tetapi juga sudah dilakukan secara daring atau jarak jauh (*online*).

Pembelajaran di masa sekarang membutuhkan pengembangan, pengetahuan, keterampilan dengan harapan siswa mampu berpikir kritis, kreatif, dan mampu memecahkan masalah serta membangun kolaborasi secara bersama. Keterbatasan dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh yang dilakukan dengan pemanfaatan teknologi. Oleh karena itu, menurut Pratiwi & Utama (2020) setidaknya terdapat enam strategi yang harus dilakukan oleh lembaga sekolah diantaranya adalah satu, wilayah akses internet yang mendukung dan dukungan dari guru yang sudah paham perkembangan digital. Kedua, keterampilan guru dan siswa dalam mendukung keterampilan seperti pemberian tugas dilakukan secara terbatas melalui media sosial. Ketiga, pembaharuan akses internet yang masih terbatas terlebih untuk daerah pelosok. Keempat, pembaharuan media untuk belajar bagi

beberapa sekolah memanfaatkan radio lokal untuk menyebarkan penugasan. Kelima, pembaharuan media untuk penugasan yang dulunya hanya bersifat dari mulut ke mulut. Keenam, tindakan alternatif bagi beberapa sekolah khusus yang misalnya harus melibatkan peserta didik dikarenakan keterbatasan akan pembelajaran.

Menurut Sagala (2013) Kurikulum merupakan suatu hal yang harus ada dalam setiap komponen pembelajaran karena digunakan sebagai standar keberhasilan suatu lembaga pendidikan dalam melakukan proses pembelajaran. Dari tahun ke tahun, penggunaan kurikulum telah banyak berganti. Hal tersebut disesuaikan dengan kondisi dan situasi pendidikan yang sedang terjadi. Program sekolah merupakan program terkini yang dilaksanakan dalam pendidikan Indonesia. Program tersebut merupakan hasil penyempurnaan dari program sekolah yang sebelumnya. Fokus dari program sekolah penggerak adalah pada pengembangan hasil belajar siswa secara keseluruhan yang cakupannya meliputi kompetensi dasar dan karakter siswa yang diawali dari kepala sekolah dan guru.

Menurut Arifin (2021) Tujuan akhir dari program sekolah penggerak adalah untuk mewujudkan pendidikan Indonesia yang lebih maju, mandiri, serta agar tercapainya tujuan negara sesuai dengan Pembukaan UUD Negara Indonesia Tahun 1945. Sekolah penggerak didirikan agar para siswa didik secara kognitif dan karakter dimerdekakan untuk mencapai visi Pancasila sebagai peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Indonesia. Sekolah penggerak merupakan sekolah yang berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa dan hasil belajar ini diawali dengan SDM yang unggul yang tidak ada substitusi yang dicerminkan juga dari

kualitas guru sebagai pendidik dan sekolah sebagai lembaga pendidikan.

Menurut Sudarmi (2020) Dalam kurikulum merdeka, guru berperan dengan mengedepankan merdeka dalam belajar, tidak memaksakan kemampuan dari masing-masing peserta didik. Dengan demikian, guru berperan sebagai fasilitator atau pendukung yang baik terhadap kemampuan prestasi yang dimiliki masing-masing siswa. Pada tahun 2021, saat pandemic Covid-19 tengah berlangsung, Indonesia harus menerapkan *social distancing* atau jaga jarak sehingga proses pembelajaran juga ikut berdampak yang awalnya ada tatap muka menjadi daring (*online*). Kejadian tersebut menuntut guru agar dapat meningkatkan kompetensinya dalam penggunaan teknologi sehingga pembelajaran tetap dapat terlaksana. Dengan demikian, proses belajar-mengajar antar guru dan siswa dapat menghasilkan luaran yang memenuhi keterampilan dan karakter yang baik bagi setiap siswa. Untuk itu, peran tidak hanya berasal dari kepala sekolah maupun guru, tetapi jelas dibutuhkan juga dukungan dari pemerintah daerah juga pemerintah pusat dalam mensukseskan program sekolah dalam pendidikan Indonesia.

Kepala sekolah SMK Negeri 1 Rantau Utara memiliki peranan yang penting dalam pengaturan tata kelola dan menjadi inisiator untuk terciptanya lingkungan belajar yang bermakna dan menyenangkan melalui penerbitan sistem yang mendukung peningkatan kualitas pendidikan. Perencanaan sebagai sekolah penggerak tidak luput dari campur tangan kepala sekolah dengan menunjuk komite pembelajaran yang membantu merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi

pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Kepala sekolah juga aktif berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Keunggulan Kurikulum Merdeka Belajar yang dilaksanakan di sekolah penggerak akan lebih fokus pada materi yang penting dan esensial sehingga kegiatan belajar dapat lebih mendalam dan tidak terburu-buru. Guru di SMK Negeri 1 Rantau Utara dapat mengajar sesuai tahap capaian dan perkembangan siswa. Kurikulum merdeka pada SMK Negeri 1 Rantau Utara diterapkan dengan melakukan penyesuaian terlebih dahulu dengan kondisi satuan pendidikan.

Kurikulum Merdeka Belajar adalah inisiatif dari pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih fleksibel dan relevan dengan kebutuhan siswa serta tantangan global. Kurikulum ini memberikan kebebasan kepada sekolah untuk menentukan cara pembelajaran yang sesuai dengan potensi dan minat siswa, serta kontekstualisasi sesuai dengan kebutuhan lokal. Namun, penerapan Kurikulum Merdeka Belajar di berbagai institusi pendidikan, termasuk di SMK Negeri 1 Rantau Utara, menghadapi berbagai tantangan. Beberapa masalah yang muncul antara lain: (1) Kesiapan Sumber Daya Manusia, dimana Guru dan tenaga kependidikan memerlukan pemahaman mendalam mengenai konsep dan prinsip Kurikulum Merdeka Belajar. Kurangnya pelatihan dan pembekalan untuk guru menjadi salah satu kendala dalam implementasi kurikulum ini secara efektif; (2) Keterbatasan Sumber Daya Fisik dan Teknologi. SMK Negeri 1 Rantau Utara mungkin menghadapi keterbatasan dalam hal fasilitas dan infrastruktur, seperti akses terhadap teknologi yang memadai dan

sarana pembelajaran yang mendukung pembelajaran berbasis proyek dan inovasi.;

(3) Adaptasi Pembelajaran. Perubahan dari kurikulum yang sebelumnya lebih kaku ke Kurikulum Merdeka Belajar yang fleksibel menuntut adanya adaptasi dari siswa dan guru. Proses ini tidak selalu berjalan mulus, terutama jika masih ada ketidakpastian atau ketidakpahaman mengenai tujuan dan metode yang tepat; (4) Keterlibatan Industri dan Masyarakat. Sebagai sekolah kejuruan, SMK Negeri 1 Rantau Utara perlu menjalin kerja sama erat dengan industri dan masyarakat sekitar untuk memastikan kurikulum yang diterapkan relevan dengan kebutuhan pasar kerja. Kurangnya sinergi ini dapat menghambat pencapaian tujuan Kurikulum Merdeka Belajar; (5) Evaluasi dan Pengawasan. Mekanisme evaluasi dan pengawasan yang efektif diperlukan untuk memastikan bahwa implementasi Kurikulum Merdeka Belajar berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Tanpa adanya pengawasan yang memadai, terdapat risiko bahwa penerapan kurikulum ini tidak maksimal atau tidak sesuai dengan tujuan awalnya.

Fenomena ini mengindikasikan bahwa manajemen pelaksanaan kurikulum belum berjalan secara optimal dan membutuhkan pendekatan yang lebih strategis. Aspek perencanaan dalam manajemen implementasi Kurikulum Merdeka di SMK Negeri 1 Rantau Utara masih perlu diperkuat. Rencana pembelajaran sering kali hanya menyalin dari *platform* Merdeka Mengajar tanpa proses adaptasi dengan kondisi lokal dan kebutuhan siswa. Sementara itu, proses pengorganisasian peran guru, tim pengembang kurikulum, dan pelaksana proyek penguatan Profil Pelajar Pancasila belum dilakukan secara kolaboratif dan partisipatif. Hal ini berpotensi menghambat kelancaran implementasi kurikulum dan menurunkan mutu

pelaksanaan pembelajaran.

Pelaksanaan pembelajaran dalam kerangka Kurikulum Merdeka menuntut guru untuk menjadi fasilitator yang memberdayakan siswa melalui pendekatan pembelajaran berdiferensiasi, asesmen formatif, dan kegiatan proyek berbasis kontekstual. Namun, sebagian guru masih menerapkan pendekatan pembelajaran konvensional yang berpusat pada guru, sehingga menurunkan efektivitas pembelajaran. Menurut Trianto (2021), pelaksanaan kurikulum yang tidak sesuai dengan prinsip Merdeka Belajar akan berdampak pada rendahnya pencapaian kompetensi siswa, baik pada aspek akademik maupun karakter. Dalam hal pengawasan, pelaksanaan supervisi akademik oleh kepala sekolah belum secara intensif menyentuh aspek substansi pembelajaran. Supervisi cenderung bersifat administratif dan tidak memberikan umpan balik konstruktif yang mampu mendorong guru untuk melakukan refleksi dan perbaikan praktik. Penelitian oleh Handayani dan Firmansyah (2023) menekankan bahwa supervisi akademik yang efektif dapat mendorong guru untuk lebih adaptif, reflektif, dan inovatif dalam menerapkan Kurikulum Merdeka.

Mutu pembelajaran di SMK Negeri 1 Rantau Utara sebagai indikator keberhasilan implementasi kurikulum masih perlu ditingkatkan. Evaluasi hasil belajar siswa menunjukkan ketimpangan antar kelas dan antar program keahlian, terutama pada kemampuan berpikir kritis, keterampilan kolaboratif, dan inisiatif dalam proyek pembelajaran. Kondisi ini mengindikasikan perlunya penguatan pada seluruh aspek manajemen implementasi kurikulum agar dapat menciptakan pembelajaran yang bermutu, relevan, dan kontekstual.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan Kurikulum Merdeka dalam meningkatkan mutu pembelajaran sangat ditentukan oleh kualitas manajemen implementasinya. Oleh karena itu, penting untuk dilakukan kajian mendalam mengenai manajemen implementasi Kurikulum Merdeka di SMK Negeri 1 Rantau Utara, khususnya pada aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan, sebagai upaya strategis dalam mendorong peningkatan mutu pendidikan kejuruan yang berdaya saing. Hal tersebutlah yang menarik perhatian penulis untuk melakukan penelitian yang berjudul “Manajemen Implementasi Kurikulum Merdeka Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Rantau Utara.”.

1.2 Fokus Masalah

Penelitian ini memiliki fokus masalah yaitu proses Manajemen dalam implementasi kurikulum merdeka sebagai kurikulum yang dijalankan, pelaksanaan kurikulum merdeka dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan, dan tantangan yang dihadapi dalam implementasi kurikulum merdeka. Mutu pendidikan juga difokuskan kepada mutu pembelajaran di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Rantau Utara.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang masalah diatas maka peneliti menetapkan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

- 1.3.1 Bagaimana manajemen implementasi kurikulum merdeka di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Rantau Utara?

1.3.2 Apakah implementasi kurikulum merdeka dapat meningkatkan mutu pendidikan di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Rantau Utara?

1.3.3 Tantangan apa saja yang dihadapi dalam implementasi kurikulum merdeka di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Rantau Utara.?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan dari penelitian tersebut sebagai berikut:

1.4.1 Untuk mengetahui manajemen implementasi kurikulum merdeka di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Rantau Utara.

1.4.2 Untuk mengetahui implementasi kurikulum merdeka dalam meningkatkan mutu pendidikan di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Rantau Utara

1.4.3 Tantangan yang dihadapi dalam implementasi kurikulum merdeka di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Rantau Utara.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat teoritis

1. Memberikan informasi setiap perencanaan kurikulum merdeka belajar menjadi target utama dalam mencapai tujuan pendidikan.
2. Mengetahui kesiapan guru sebelum dan sesudah strategi pelaksanaan kurikulum merdeka belajar di Sekolah
3. Memberikan informasi keunggulan dari implementasi kurikulum merdeka serta pencapaian Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Rantau Utara dengan tantangan dalam implementasi kurikulum merdeka belajar.

1.5.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Kepala Dinas Pendidikan. Penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan strategis terkait implementasi Kurikulum Merdeka di satuan pendidikan, khususnya pada jenjang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
2. Bagi Pengawas Sekolah. Penelitian ini dapat menjadi acuan dalam melaksanakan fungsi supervisi akademik dan manajerial terhadap implementasi Kurikulum Merdeka di sekolah.
3. Bagi Kepala Sekolah. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi sebagai bahan evaluasi dalam pengelolaan implementasi Kurikulum Merdeka.
4. Bagi Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Penelitian ini dapat menjadi pedoman dalam menyusun program akademik, pengelolaan pembelajaran, serta koordinasi pelaksanaan Kurikulum Merdeka di sekolah.
5. Bagi Guru. Penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai implementasi Kurikulum Merdeka dalam proses pembelajaran.
6. Bagi Peserta Didik. Penelitian ini diharapkan memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas proses pembelajaran yang lebih fleksibel, kontekstual, dan sesuai dengan kebutuhan serta potensi siswa.
7. Bagi Peneliti Selanjutnya. Penelitian ini dapat menjadi referensi ilmiah dan bahan kajian lanjutan bagi peneliti lain yang ingin meneliti tentang manajemen implementasi Kurikulum Merdeka atau topik lain yang relevan dalam bidang manajemen pendidikan.